

BAB I

PENDAHULUAN

1. Ilmu Politik dan Alasan Mempelajarinya

Filsuf politik Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa ilmu politik dalam arti yang lebih sempit—politik dalam arti sesungguhnya adalah tindakan dan pertimbangan atau kebijakan. Oleh karena itu, beliau tidak menyarankan kepada anak-anak muda untuk mempelajari politik, karena menurut beliau, anak-anak muda tidak cocok dengan urusan-urusan praktis dari kehidupan sebagai sumber premis dan data ilmu politik.

Mereka masih murni dan sangat dipengaruhi oleh perasaan-perasaannya, akibatnya (orang-orang muda itu) tidak akan memperoleh banyak manfaat dari studi politik yang sasaran akhirnya bukanlah *to know* (paham) melainkan *to do* (bertindak)¹. Membedakan Ilmu Politik di Perguruan Tinggi dari pelajaran politik di SLTA, dengan dua cara utama:

Pertama, politik kurang berkaitan dengan urusan biasa atau kejadian sehari-hari, juga bukan mengenai apa yang terlihat pada level permukaan saja. Tetapi lebih mengenai apa yang terjadi di bawah permukaan, atau di luar apa yang terlihat. Bukan berarti apa yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Melainkan,

¹ Aristotle. 1953. *The Ethics*, terj. J.A.K. Thompson, Harmondsworth, Middlesex: Penguin, h. 28.

bahwa selain memerhatikan apa yang terjadi, kita juga menyelidiki mengapa sesuatu terjadi dan kapan ia terjadi: jadi kita mempelajari penyebab kejadian-kejadian politik dan strukturnya politik, seperti mencari makna-makna dan motivasi-motivasi yang tersembunyi.

Belajar politik di perguruan tinggi lebih terkait dengan menjelaskan bagaimana suatu sistem politik tersusun, mengapa ada perbedaan bentuk sistem politik dalam masyarakat yang berbeda, bagaimana sistem politik itu bekerja dan seterusnya. Sebagai salah satu ilmu sosial, ilmu politik menganalisis struktur-struktur dan praktik-praktik di sekitar masyarakat manusia. Sering pula terjadi tumpang tindih dengan ilmu lain.

Seperti Ekonomi, politik juga mempelajari persoalan alokasi sumber daya (*resource allocation*), tetapi lebih dalam perspektif “*power*”: faktor-faktor apa yang menentukan “*who gets what, when and how*”. Ia memperlakukan semua aspek organisasi dan administrasi, perjuangan dan sengketa, kepemimpinan dan otoritas, kebijakan dan pembuatan keputusan, di mana pun ia berlaku, baik dalam sektor privat maupun juga dalam sektor publik, baik di dalam negara-bangsa (*nation-state*) maupun dalam arena global. Jadi tidak terbatas hanya mempelajari pemerintahan atau para politisinya saja.

Sehingga, ia merupakan ilmu yang multisegi (*multifacet*), sangat memerhatikan pengembangan ilmu pengetahuan yang secara langsung relevan untuk mengelola dan mengkritisi keragaman keorganisasian masyarakat di mana pun kita berada. Fokus khususnya adalah mencoba untuk mencari solusi yang masuk akal tentang berbagai persoalan etik dan keorganisasian yang

pelik yang harus diatasi bagi memenuhi kepentingan rakyat yang lebih luas, agar mereka berhasil dalam hidup dan bekerja sama satu sama lain dalam teritori bersama (atau negara), sebagaimana asosiasi dengan interaksi yang kompleks antarnegara.

Ia sangat memerhatikan persoalan cara terbaik, dalam praktik, bagaimana meraih nilai-nilai yang diinginkan seperti kebebasan politik atau persamaan (*political freedom or equality*). Ilmu politik menganalisis kebaikan-kebaikan relatif dari berbagai bentuk pemerintahan yang berbeda, dan organisasi internasional. Sehingga, ia memiliki dimensi nilai yang berarti. Tujuannya secara umum adalah untuk membangun pengetahuan yang lebih realistis (*reliable*) dan sistematis tentang bagaimana organisasi-organisasi politik muncul, berkembang dan bekerja. Dengan harapan agar pengetahuan ini akan dapat membantu di dalam mengembangkan masa depan masyarakat yang lebih menantang dan lebih bergairah.

Kedua, ilmu politik di universitas itu berbeda karena ia kurang tertarik pada deskripsi fakta-fakta yang sederhana atau dangkal. Di universitas lebih berkaitan dengan gagasan-gagasan (*ideas*) dan konsep-konsep. Punya pengalaman politik di SLTA akan membuat Anda lebih akrab dengan istilah-istilah (terminologi) atau isu-isu politik. Bagaimana pun, banyak orang mendapati pelajaran-pelajaran di universitas, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, sangat berbeda dari di sekolah, terutama karena pertama-tama ilmu-ilmu sosial itu kelihatan lebih abstrak.

Gambaran ini berkaitan dengan banyak hal. Kami sedang melatih Anda untuk “menjaga jarak” antara

diri Anda dengan apa yang sedang Anda pelajari. Ini berarti menambah kemampuan Anda untuk menilai dan memisahkan, sehingga Anda akan mampu memisahkan antara fakta yang lebih berarti dengan fakta yang kurang berarti. Dan menghindari terjebak atau tenggelam oleh detail dan keruwetan (*detail and complexity*).

Kami coba membuat Anda lebih sadar akan jarak antara rupa yang tampak dengan realitas, sehingga Anda mengurangi intervensi perasaan terhadap kesan-kesan pertama; dan lebih sadar akan hubungan sebab-akibat, atau arti pentingnya prinsip-prinsip pertama. Kami sengaja dengan cermat mencoba menggiring Anda untuk berpikir (atau mengonsep) pada tataran teoritis yang lebih umum, karena ini menambah kemampuan Anda untuk menguraikan sesuatu. Pemahaman—dan kemampuan intelektual—tumbuh bersamaan dengan kemampuan mengembangkan uraian atau penjelasan yang lebih luas dengan memasukkan pengetahuan tentang hubungan-hubungan kausal.

Mempelajari politik berarti mengajarkan keluasan keahlian-keahlian berikut ini:

a. An analytic or logical capacity. (Kapasitas analitis dan logis).

Menjadi mampu melukiskan perbedaan yang relevan dan signifikan antara berbagai kelompok informasi atau argumen. Mampu menyaring dan melakukan kontrol atau menskema materi lain yang berlebih-lebihan atau membingungkan. Mampu melakukan pengawasan intelektual dan mengelompokkan data-data yang Anda hadapi.

b. *A synthetic capacity.* (Kapasitas sintetik).

Menjadi mampu melihat kaitan-kaitan, melihatapa yang berlangsung denganapa. Menjadi mampu membuat kejutan atau kaitan-kaitan yang tak terduga dengan mengelompokkan yang sama dengan yang beda menurut skema konseptual atau skema klasifikasi yang mampu Anda bangun. Politik khususnya punya nilai untuk mengajarkan orang tentang macam-macam kemampuan dan cara pikir konseptual yang berguna di dalam situasi pembuatan keputusan yang rumit. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk berbicara kepada berbagai kategori keahlian (spesialis), dan mengoordinasikan berbagai kontribusi mereka ke dalam kerangka keputusan bersama.

c. *The skills of critical detachment and perspective.* (Kemahiran melepaskan diri secara kritis dan memiliki perspektif).

Untuk membuat keputusan seseorang harus mampu memisahkan dirinya dan emosinya dari peristiwa atau situasi yang dihadapi. Ia harus mampu keluar dari tekanan dengan segera, melihat latar belakang peristiwa, melihat rangkaian sebab akibat yang lebih luas. Pada saat yang sama, secara paradoks, mengembangkan kapasitas untuk “pemisahan kritis” (*critical detachment*) yang melibatkan penilaian atas persoalan-persoalan yang mengikat pada upaya pelepasan abstrak demi kepentingannya sendiri. Pada akhirnya, politik merupakan disiplin ilmu yang ‘sibuk’, sibuk dalam memahami dunia.

Ada juga *skill* lain yang diturunkan dari perolehan pengetahuan yang lebih baik tentang persoalan spesifik sebagaimana cara *policy* dibuat, atau cara pemerintahan atau negara menjalankan bisnis (atau menentukan perang) satu dengan lainnya. Politik menggiring Anda untuk berhubungan dengan sesungguhnya dengan semua subjek lainnya, termasuk ilmu seperti kemanusiaan.

Merupakan subjek ajaib yang tepat untuk menghimpun semua bentuk informasi tentang dunia, dan semakin Anda mempelajarinya, semakin membantu Anda untuk menciptakan peralatan konseptual, atau semacam jaringan intelektual, untuk menyaring dan mengoordinasikan semua informasi ini. Politik merupakan subjek khusus yang tepat bagi pikiran kritis dan kreatif. Ia membantu pengembangan intelektualitas, karena ia terus-menerus menggabung unsur-unsur teori dengan studi praktis terhadap peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan konkret.

Mempelajari politik menyediakan informasi dan keahlian yang luas, terutama penting bagi warga di dalam negara demokrasi, yaitu warga yang ingin menunjukkan kepentingannya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan memberikan suara berdasarkan itu. Juga penting untuk mempelajari tentang ide-ide dan nilai-nilai yang membantu membentuk tradisi politik kita sendiri, seperti banyak belajar tentang negara-negara lain, sehingga kita dapat memperoleh perspektif perbandingan.

Mempelajari politik seharusnya membantu Anda untuk merasukkan sedikit lebih dalam tentang tampilan luar dari sesuatu. Anda harus lebih belajar tentang mengapa persoalan-persoalan yang kelihatannya agak sederhana ternyata menghasilkan konflik dan nafsu yang tak terduga;

mengapa *policy* pemerintah yang dikedepankan dengan keyakinan yang baik ternyata menjadi kontraproduktif; di mana *power* berada; bagaimana *power* berubah menjadi otoritas; dan seterusnya. Dan semua ini akan membantu Anda mengembangkan suatu pandangan yang lebih terang terhadap dunia tempat tinggal kita.

2. Pengertian Teori Politik

Istilah ‘teori’ sering kali disalahartikan sebagai sesuatu pengertian yang tidak memiliki landasan fakta atau realitas. Misalnya sering kita mendengar seseorang mengatakan “Ah, itu kan hanya teori saja”. Pandangan awam seperti ini menjadi wajar bila seseorang tidak memahami metodologi ilmu. Padahal sesungguhnya bila kita telah memahami secara benar apa yang dimaksud dengan teori, maka kita pasti sangat memerlukan ‘teori’ sebagai landasan tindakan politik kita agar tidak bertindak ceroboh.

Jadi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teori? Generalisasi atau penyimpulan terhadap berbagai fenomena yang sejenis di berbagai tempat yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi dan kemudian diabstraksikan secara sistematis itulah yang disebut teori. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Fuad Hassan dan Koentjaraningrat (1991:10), fungsi teori itu adalah:

- 1.1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan;
- 1.2. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian;

- 1.3. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi;
- 1.4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi terhadap berbagai fenomena yang bersifat politik. Dalam menyusun teori politik digunakan berbagai konsep politik. Konsep ini secara metodologis merupakan pernyataan yang mewakili fenomena politik. Konsep yang dibahas dalam teori politik meliputi masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, partisipasi politik, dan sebagainya.

Proses pembentukan teori politik dimulai dengan mengamati berbagai fenomena politik melalui suatu proses metodologis (siklus ilmiah) yang selanjutnya digeneralisasi secara empiris. Dalam melakukan generalisasi harus didasarkan pada pengukuran dan penentuan sampel dan perkiraan tolok ukur yang jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bias dalam menggeneralisasi fenomena politik.

Setelah fenomena politik digeneralisasi, kemudian diabstraksikan untuk menjadi teori politik. Dalam proses abstraksi itu diperlukan kegiatan pembentukan konsep, pembentukan proposisi dan penyusunan proposisi; maka akhirnya terbentuklah teori politik.

Tetapi pada beberapa buku yang menguraikan tentang teori politik, kita akan menemukan para sarjana mencampurkan uraian teori politik dengan filsafat politik

yang lebih bersifat normatif. Dalam hal ini, Thomas P. Jenkin (1962) dalam bukunya *The Study of Political Theory* membagi dua macam teori politik, yaitu:

2.1. Teori politik yang mengandung nilai (*valutional*) yaitu teori politik yang memiliki dan membawa aspek normatif seperti baik buruknya, hakikat, pilihan tindakan yang tepat dalam politik. Termasuk kelompok ini adalah filsafat politik, ideologi politik dan teori politik sistematis. Yang dimaksud dengan teori politik sistematis adalah langkah operasional dari filsafat politik, misalnya penerapan hak asasi manusia, sistem politik yang demokratis, hukum yang adil, dan sebagainya.

2.2. Teori politik *non-valutional*, yaitu teori politik yang mendeskripsikan berbagai fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan aspek norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau negara. Kelompok ini disebut juga sebagai teori politik bebas nilai (*value free*). Misalnya bagaimana meraih tujuan negara, memenangkan peperangan, meraih kekuasaan dan sebagainya tanpa pertimbangan baik buruknya cara yang digunakan, akibatnya bagi hak-hak asasi manusia, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori politik seharusnya merupakan generalisasi fenomena politik yang berdasarkan fakta politik yang ada dan masuk akal, bukan sekedar khayalan tak berdasar. Secara metodologis, teori politik memiliki tingkat validitas dan pembuktian sesuai dengan fakta empirik dan kenyataan politik.

3. Teori Politik dan Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah akomodasi pancaindra terhadap gejala-gejala politik yang kemudian dibuat dalam berbagai pernyataan terhadap fenomena atau gejala-gejala politik. Tingkat teoritis penilaian politik dapat dikatakan sangat lemah karena fenomena politik yang diamati sangat terbatas dan hasil pengamatan tersebut langsung diproses dalam pikiran menurut pengalaman individu dan kemudian individu mengemukakan pernyataan baru. Pernyataan ini yang disebut Pemikiran Politik. Bahwa pemikiran politik merupakan embrio untuk pembentukan teori politik.

Individu dikatakan terlibat dengan pemikiran politik bila mereka coba menentukan ide-ide politik mana yang menawarkan lebih banyak janji, solusi politik mana yang terbaik merespons tantangan-tantangan nyata, dan rezim politik mana yang paling dekat dengan kebutuhan-kebutuhan warga.

Dalam bukunya *Political Thinking, Political Theory and Civil Society*, de Lue (2002) coba memperkenalkan ciri-ciri pemikiran politik, juga mendiskusikan apa itu teori politik dan bagaimana kita harus memahami pemikiran politik dalam kaitannya dengan teori politik. Dalam hal ini, de Lue menggunakan terminologi teori politik yang saling bergantian dengan istilah filsafat politik. Begitu pula Magstadt (2003: 14) yang memasukkan filsafat politik sebagai teori politik normatif.

Magstadt mulai dengan metode Plato (400 SM) dalam mencari kebenaran yaitu dengan mengajukan pertanyaan penting: *What is the good life? What is good government?* Sampai sejauh manakah *good government*